



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



(0526) 2028114 Kalimantan Selatan



DPMPPTSP.Balangan@gmail.com



Jl. Jendral A. Yani KM. 1 No. 1 Paringin Kota
Kabupaten Balangan



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan salah satu tahapan dari Perencanaan Pembangunan Daerah secara keseluruhan untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya penghargaan dan ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya sehingga tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini. Kami menyadari Renja ini masih perlu penyempurnaan. Walau demikian, besar harapan semoga Renja ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kinerja pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Paringin, Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan Renja.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
 LALU.....	8
2.1. Evaluasi Rencana Kerja DPMPTSP	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP	
Kabupaten Balangan.....	34
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	45
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Sinergitas Kebijakan	
Daerah	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	46
3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Balangan Tahun	
2025.....	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
 DAERAH	53
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2025.....	53
4.2. Analisis Sosial Ekonomi.....	63
BAB V PENUTUP	65
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. Dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen rancangan awal rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja SKPD 2025 merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Awal Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang antara lain:

- a. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
- b. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
- c. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, selaras dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 dijadikan salah satu dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Kalsel;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintahan urusan bidang penanaman modal serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk tahun 2025 sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara

terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat dicapai secara optimal.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENJA

Sistematika penulisan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Rencana Kerja DPMPTSP
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
DPMPTSP Kabupaten Balangan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Sinergitas
Kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Balangan
Tahun 2025

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Tahun 2025

4.2. Analisis Sosial Ekonomi

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI RENCANA KERJA DPMPTSP

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang didasarkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan

pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Jika dibandingkan tahun 2021 dengan tahun 2022, ada perubahan yang cukup signifikan terkait indikator kinerja, hal ini dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2023 sangat baik, yaitu sebesar Rp. **37.068.905.907,-** atau sebesar 96,47% dari total anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang dialokasikan sebesar Rp. **38.424.373.279.-**

Anggaran dan realisasi belanja langsung dan tidak langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kab. Balangan
Berdasarkan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi		
		Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	52,598,600	46,528,500	100.00	88.46
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	52,598,600	46,528,500	100.00	88.46
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	23,569,800	20,600,000	100.00	87.40
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	29,028,800	25,928,500	100.00	89.32
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14,119,215,100	13,847,971,207	149.28	98.08
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3,430,970,100	3,172,802,016	404.17	92.48
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2,722,240,100	2,469,328,361	100.00	90.71
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan	708,730,000	703,473,655	100.00	99.26

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3,289,160,000	3,282,927,968	100.00	99.81
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3,289,160,000	3,282,927,968	100.00	99.81
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	95,085,000	89,329,723	100.00	93.95
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	95,085,000	89,329,723	100.00	93.95
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,304,000,000	7,302,911,500	99.34	99.99
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	7,304,000,000	7,302,911,500	100.00	99.99
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,255,473,500	1,211,502,771	97.34	99.66
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1,132,524,200	1,113,152,071	100.00	102.39
Pelayanan antar Kerja	112,234,200	106,131,100	100.00	94.56
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	701,448,000	699,232,715	100.00	99.68
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	27,500,800	21,589,100	100.00	78.50
Perluasan Kesempatan Kerja	291,341,200	286,199,156	100.00	116.34
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11,428,800	2,750,000	100.00	24.06
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	11,428,800	2,750,000	100.00	24.06
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	91,939,300	78,724,700	25.00	80.84
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12,105,700	10,575,600	100.00	87.36
Job Fair/Bursa Kerja	79,833,600	68,149,100	100.00	79.92
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	19,581,200	16,876,000	100.00	86.18
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	14,141,200	11,464,000	100.00	81.07
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	5,440,000	5,412,000	0.00	99.49
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4,267,296,100	4,105,114,992	100.00	96.20
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,889,885,400	3,732,068,003	100.00	95.94
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	3,889,885,400	3,732,068,003	100.00	95.94
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	377,410,700	373,046,989	100.00	98.84

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	195,145,000	194,451,338	100.00	99.64
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16,690,000	16,096,322	100.00	96.44
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	165,575,700	162,499,329	100.00	98.14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,022,289,529	12,553,768,793	0.00	97.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149,601,800	140,126,045	100.00	84.36
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,185,000	22,390,409	100.00	96.57
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,185,000	13,919,000	100.00	81.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,635,000	16,893,000	100.00	95.79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54,105,000	49,773,833	100.00	91.99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,491,800	37,149,803	100.00	99.09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,797,640,778	8,517,845,711	100.00	96.43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,331,662,778	7,066,075,394	95.45	96.38
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,386,968,000	1,376,084,317	100.00	99.22
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35,005,000	34,463,800	100.00	98.45
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44,005,000	41,222,200	100.00	93.68
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	351,932,500	327,373,600	100.00	93.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	161,282,500	158,683,200	100.00	98.39
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190,650,000	168,690,400	100.00	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,404,687,850	1,346,101,123	100.00	95.83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45,639,100	45,639,100	100.00	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670,387,150	620,951,400	100.00	92.63
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76,471,100	74,244,700	100.00	97.09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,866,300	19,866,300	100.00	0.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592,324,200	585,399,623	100.00	98.83

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242,446,200	223,706,200	100.00	200.73
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174,000,000	155,260,000	100.00	361.07
Pengadaan Mebel	68,446,200	68,446,200	100.00	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923,333,501	880,570,973	100.00	95.37
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412,196,401	373,903,873	100.00	90.71
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511,137,100	506,667,100	100.00	99.13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,152,646,900	1,118,045,141	100.00	97.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395,596,900	375,717,363	106.45	94.97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	757,050,000	742,327,778	100.00	98.06
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	195,951,400	157,785,291	100.00	80.52
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55,902,400	39,752,091	0.00	71.11
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6,859,600	0	0.00	0.00
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	49,042,800	39,752,091	100.00	81.06
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	140,049,000	118,033,200	100.00	84.28
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7,510,000	0	0.00	0.00
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	132,539,000	118,033,200	100.00	89.06
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3,639,849,000	3,437,896,150	210.04	94.45
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,639,849,000	3,437,896,150	100.00	94.45
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	127,758,000	123,832,180	100.00	96.93
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3,512,091,000	3,314,063,970	100.00	94.36
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	617,437,750	600,643,099	104.83	97.28
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	617,437,750	600,643,099	100.00	97.28
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	213,337,050	198,768,709	81.71	93.17

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20,248,400	19,256,400	81.71	95.10
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	334,084,800	333,114,990	78.00	99.71
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	49,767,500	49,503,000	81.71	99.47
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	535,380,800	397,844,366	100.00	74.31
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	535,380,800	397,844,366	100.00	74.31
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14,486,400	13,816,400	117.14	95.37
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	395,735,600	283,021,851	107.67	71.52
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	125,158,800	101,006,115	117.14	80.70
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	406,463,400	401,328,145	100.00	98.74
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	406,463,400	401,328,145	100.00	98.74
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	406,463,400	401,328,145	100.00	98.74
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	112,275,500	110,759,893	100.00	98.65
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112,275,500	110,759,893	100.00	98.65
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,985,000	14,298,000	100.00	95.42
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	97,290,500	96,461,893	100.00	99.15
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200,142,600	197,762,700	98.90	98.81
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	200,142,600	197,762,700	100.00	98.81
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	15,132,600	14,435,700	100.00	95.39
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	185,010,000	183,327,000	100.00	99.09
Jumlah Anggaran dari seluruh Program	38,424,373,279	37,068,905,907		96.47

Sedangkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)

Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6x100%		8=5+7	9=8/4x100 %
			K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	30 %	30 %	100 %	52,598,600	100 %	46,528,500	100.00	88.46	100 %	333.33
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK	70 %	70 %	80 %	52,598,600	80 %	46,528,500	100.00	88.46	80 %	114.29
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23,569,800	1 Dokumen	20,600,000	100.00	87.40	2 Dokumen	200.00
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	0 Perusahaan	10 Perusahaan	29,028,800	10 Perusahaan	25,928,500	100.00	89.32	10 Perusahaan	20.00
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	100 %	26.33 %	60 %	14,119,215,100	89.57 %	13,847,971,207	149.28	98.08	89.57 %	89.57
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	100 %	87.5 %	24 %	3,430,970,100	97 %	3,172,802,016	404.17	92.48	97 %	97.00

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

2.07.03.2 .01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N	1344 Orang	224 Orang	224 Orang	2,722,240,100	224 Orang	2,469,328,361	100.00	90.71	448 Orang	33.33
2.07.03.2 .01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	3 Lembaga	4 Lembaga	708,730,000	4 Lembaga	703,473,655	100.00	99.26	7 Lembaga	70.00
2.07.03.2 .02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang terakreditasi	100 %	100 %	100 %	3,289,160,000	100 %	3,282,927,968	100.00	99.81	100 %	100.00
2.07.03.2 .02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terakreditasi	10 LPK	2 LPK	2 LPK	3,289,160,000	2 LPK	3,282,927,968	100.00	99.81	4 LPK	40.00
		Jumlah LPKS yang Dibina	35 Lembaga	2 Lembaga	35 Lembaga		35 Lembaga		100.00		35.00	100.00
2.07.03.2 .04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	100 %	97.31 %	100 %	95,085,000	100 %	89,329,723	100.00	93.95	100 %	100.00
2.07.03.2 .04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	10 Perusahaan	22 Perusahaan	95,085,000	22 Perusahaan	89,329,723	100.00	93.95	32 Perusahaan	64.00
2.07.03.2 .05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensi dan produktivitasnya	3000 orang	0 orang	1220 orang	7,304,000,000	1212 orang	7,302,911,500	99.34	99.99	1212 orang	40.40
2.07.03.2 .05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	7,304,000,000	1 Dokumen	7,302,911,500	100.00	99.99	1 Dokumen	25.00
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	65 %	65.71 %	65 %	1,255,473,500	63.27 %	1,211,502,771	97.34	99.66	63.27 %	97.34

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

2.07.04.2 .01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	100 %	65.71 %	100 %	1,132,524,200	100 %	1,113,152,071	100.00	102.39	165.71 %	165.71
2.07.04.2 .01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	600 Orang	10 Orang	60 Orang	112,234,200	60 Orang	106,131,100	100.00	94.56	70 Orang	11.67
2.07.04.2 .01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan	100 Orang	0 Orang	331 Orang	701,448,000	331 Orang	699,232,715	100.00	99.68	331 Orang	331.00
2.07.04.2 .01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	5 Orang	5 Orang	27,500,800	5 Orang	21,589,100	100.00	78.50	10 Orang	40.00
2.07.04.2 .01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	100 Orang	20 Orang	40 Orang	291,341,200	40 Orang	286,199,156	100.00	116.34	60 Orang	60.00
2.07.04.2 .02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki Izin/terdaftar di Kabupaten Balangan	100 LPTKS	0 LPTKS	100 LPTKS	11,428,800	100 LPTKS	2,750,000	100.00	24.06	100 LPTKS	100.00
2.07.04.2 .02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	8 Lembaga	0 Lembaga	2 Lembaga	11,428,800	2 Lembaga	2,750,000	100.00	24.06	2 Lembaga	25.00
2.07.04.2 .03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase dokumen informasi pasar kerja	100 %	0 %	100 %	97,379,300	25 %	78,724,700	25.00	80.84	25 %	25.00
2.07.04.2 .03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja Online	48 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12,105,700	12 Dokumen	10,575,600	100.00	87.36	12 Dokumen	25.00
2.07.04.2 .03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 Orang	0 Orang	10 Orang	85,273,600	10 Orang	68,149,100	100.00	79.92	10 Orang	25.00
2.07.04.2 .04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI/CPMI/Masyarakat yang mendapatkan layanan	100 %	0 %	100 %	19,581,200	100 %	16,876,000	100.00	86.18	100 %	100.00

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

2.07.04.2 .04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	40 Orang	0 Orang	10 Orang	14,141,200	10 Orang	11,464,000	100.00	81.07	10 Orang	25.00
2.07.04.2 .04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	60 Orang	0 Orang	0 Orang	5,440,000	0 Orang	5,412,000	0.00	99.49	0 Orang	0.00
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	4,267,296,100	100 %	4,105,114,992	100.00	96.20	100 %	100.00
2.07.05.2 .01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100 %	100 %	100 %	3,889,885,400	100 %	3,732,068,003	100.00	95.94	100 %	100.00
2.07.05.2 .01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3,889,885,400	1 Laporan	3,732,068,003	100.00	95.94	2 Laporan	40.00
2.07.05.2 .02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100 %	100 %	100 %	377,410,700	100 %	373,046,989	100.00	98.84	100 %	100.00
2.07.05.2 .02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	195,145,000	3 Perkara	194,451,338	100.00	99.64	3 Perkara	100.00

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

2.07.05.2 .02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Teselesaikan	3 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	16,690,000	3 Perkara	16,096,322	100.00	96.44	6 Perkara	0.00
2.07.05.2 .02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	0 Lembaga	1 Lembaga	165,575,700	1 Lembaga	162,499,329	100.00	98.14	1 Lembaga	25.00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	75 (BB)	71.19 (BB)	71.2 (BB)	13,022,289,529	0 (BB)	12,553,768,793	0.00	97.01	0 (BB)	0.00
2.18.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	100 %	100 %	149,601,800	100 %	140,126,045	100.00	84.36	100 %	100.00
2.18.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	23,185,000	2 Dokumen	22,390,409	100.00	96.57	4 Dokumen	33.33
2.18.01.2 .01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,185,000	1 Dokumen	13,919,000	100.00	81.00	2 Dokumen	33.33
2.18.01.2 .01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,635,000	1 Dokumen	16,893,000	100.00	95.79	2 Dokumen	33.33
2.18.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	54,105,000	2 Laporan	49,773,833	100.00	91.99	4 Laporan	33.33

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

2.18.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	37,491,800	2 Laporan	37,149,803	100.00	99.09	4 Laporan	200.00
2.18.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	8,797,640,778	100 %	8,517,845,711	100.00	96.43	100 %	100.00
2.18.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	7,331,662,778	42 Orang/Bulan	7,066,075,394	95.45	96.38	85 Orang/Bulan	170.00
2.18.01.2 .02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,386,968,000	12 Dokumen	1,376,084,317	100.00	99.22	24 Dokumen	200.00
2.18.01.2 .02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35,005,000	1 Dokumen	34,463,800	100.00	98.45	2 Dokumen	33.33
2.18.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44,005,000	1 Laporan	41,222,200	100.00	93.68	2 Laporan	33.33
2.18.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	351,932,500	100 %	327,373,600	100.00	93.02	100 %	100.00
2.18.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	50 Paket	50 Paket	161,282,500	50 Paket	158,683,200	100.00	98.39	100 Paket	200.00
2.18.01.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	43 Orang	44 Orang	190,650,000	44 Orang	168,690,400	100.00	0.00	44 Orang	88.00
2.18.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	1,404,687,850	100 %	1,346,101,123	100.00	95.83	100 %	100.00
2.18.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	45,639,100	1 Paket	45,639,100	100.00	100.00	2 Paket	200.00

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

		Bangunan Kantor yang Disediakan										
2.18.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	670,387,150	1 Paket	620,951,400	100.00	92.63	2 Paket	200.00
2.18.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	76,471,100	1 Paket	74,244,700	100.00	97.09	2 Paket	200.00
2.18.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	19,866,300	1 Dokumen	19,866,300	100.00	0.00	2 Dokumen	200.00
2.18.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	592,324,200	75 Laporan	585,399,623	100.00	98.83	150 Laporan	25.00
2.18.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	242,446,200	100 %	223,706,200	100.00	200.73	100 %	100.00
2.18.01.2 .07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	7 Unit	174,000,000	7 Unit	155,260,000	100.00	361.07	7 Unit	70.00
2.18.01.2 .07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0 Unit	2 Unit	68,446,200	2 Unit	68,446,200	100.00	100.00	2 Unit	20.00
2.18.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	923,333,501	12 Bulan	880,570,973	100.00	95.37	12 Bulan	16.67
2.18.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	412,196,401	12 Laporan	373,903,873	100.00	90.71	24 Laporan	33.33
2.18.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	511,137,100	12 Laporan	506,667,100	100.00	99.13	24 Laporan	33.33

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

2.18.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1,152,646,900	12 Bulan	1,118,045,141	100.00	97.00	12 Bulan	16.67
2.18.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	31 Unit	31 Unit	395,596,900	33 Unit	375,717,363	106.45	94.97	64 Unit	206.45
2.18.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	757,050,000	2 Unit	742,327,778	100.00	98.06	4 Unit	200.00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	6 potensi	1 potensi	1 potensi	195,951,400	1 potensi	157,785,291	100.00	80.52	2 potensi	33.33
2.18.02.2 .01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55,902,400	0 Dokumen	39,752,091	0.00	71.11	1 Dokumen	100.00
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen		0.00		0 Dokumen	0.00
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	6 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100.00		1 Dokumen	16.67
2.18.02.2 .01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	6,859,600	0 Dokumen	0	0.00	0.00	0 Dokumen	0.00
2.18.02.2 .01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	49,042,800	25 Kegiatan Usaha	39,752,091	100.00	81.06	50 Kegiatan Usaha	200.00

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

	dan Kemudahan Penanaman Modal	Kemudahan Berusaha di Daerah										
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	0 Dokumen Peta Potensi	1 Dokumen Peta Potensi	140,049,000	1 Dokumen Peta Potensi	118,033,200	100.00	84.28	1 Dokumen Peta Potensi	100.00
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	7,510,000	0 Dokumen	0	0.00	0.00	0 Dokumen	0.00
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	132,539,000	1 Dokumen	118,033,200	100.00	89.06	1 Dokumen	100.00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	110000000 0000 Rupiah	443424000 000 Rupiah	210000000 0000 Rupiah	3,639,849,000	44108500 0000 Rupiah	3,437,896,150	210.04	94.45	88450900 0000 Rupiah	80.41
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pameran penanaman modal	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,639,849,000	1 Kegiatan	3,437,896,150	100.00	94.45	2 Kegiatan	40.00
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	10 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00		0 Kegiatan	0.00
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	127,758,000	1 Dokumen	123,832,180	100.00	96.93	2 Dokumen	200.00
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	3,512,091,000	2 Dokumen	3,314,063,970	100.00	94.36	3 Dokumen	300.00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	94 Nilai	88.5 Nilai	88 Nilai	617,437,750	92,25 Nilai	600,643,099	104.83	97.28	92.25 Nilai	98.14
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100 %	100 %	100 %	617,437,750	100 %	600,643,099	100.00	97.28	100 %	100.00

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	700 Izin	673 Izin	700 Izin		572 Izin		81.71		572 Izin	81.71
2.18.04.2 .01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	673 Pelaku Usaha	700 Pelaku Usaha	213,337,050	572 Pelaku Usaha	198,768,709	81.71	93.17	1245 Pelaku Usaha	177.86
2.18.04.2 .01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	700 Kegiatan Usaha	673 Kegiatan Usaha	700 Kegiatan Usaha	20,248,400	572 Kegiatan Usaha	19,256,400	81.71	95.10	1245 Kegiatan Usaha	177.86
2.18.04.2 .01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	76 Orang	100 Orang	334,084,800	78 Orang	333,114,990	78.00	99.71	154 Orang	154.00
2.18.04.2 .01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	700 Kegiatan Usaha	673 Kegiatan Usaha	700 Kegiatan Usaha	49,767,500	572 Kegiatan Usaha	49,503,000	81.71	99.47	1245 Kegiatan Usaha	177.86
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	100 %	100 %	100 %	535,380,800	100 %	397,844,366	100.00	74.31	100 %	100.00
2.18.05.2 .01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang	Laporan realisasi penanaman modal	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	535,380,800	4 Laporan	397,844,366	100.00	74.31	8 Laporan	33.33

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTP Kabupaten Balangan

	menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											
2.18.05.2 .01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	14,486,400	41 Kegiatan Usaha	13,816,400	117.14	95.37	66 Kegiatan Usaha	264.00
2.18.05.2 .01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	395,735,600	323 Pelaku Usaha	283,021,851	107.67	71.52	348 Pelaku Usaha	1,392.00
2.18.05.2 .01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	125,158,800	41 Kegiatan Usaha	101,006,115	117.14	80.70	66 Kegiatan Usaha	264.00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %	100 %	100 %	406,463,400	100 %	401,328,145	100.00	98.74	100 %	100.00
2.18.06.2 .01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %	100 %	100 %	406,463,400	100 %	401,328,145	100.00	98.74	100 %	100.00
2.18.06.2 .01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	406,463,400	6 Dokumen	401,328,145	100.00	98.74	12 Dokumen	200.00
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	100 %	0 %	100 %	112,275,500	100 %	110,759,893	100.00	98.65	100 %	100.00

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

3.32.03.2 .01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	80 Orang	0 Orang	20 Orang	112,275,500	20 Orang	110,759,893	100.00	98.65	20 Orang	25.00
3.32.03.2 .01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan inkronisasi kerja sama pembangunan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14,985,000	1 Laporan	14,298,000	100.00	95.42	2 Laporan	200.00
3.32.03.2 .01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97,290,500	1 Dokumen	96,461,893	100.00	99.15	2 Dokumen	200.00
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase lahan usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19.5 %	18.84 %	19.05 %	200,142,600	18.84 %	197,762,700	98.90	98.81	18.84 %	96.62
3.32.04.2 .01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	200,142,600	1 Satuan Permukiman	197,762,700	100.00	98.81	2 Satuan Permukiman	200.00
3.32.04.2 .01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	54 Kepala Keluarga	54 Kepala Keluarga	54 Kepala Keluarga	15,132,600	54 Kepala Keluarga	14,435,700	100.00	95.39	108 Kepala Keluarga	200.00
3.32.04.2 .01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	185,010,000	1 Satuan Permukiman	183,327,000	100.00	99.09	2 Satuan Permukiman	200.00

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan Mewujudkan misi ke II Kepala Daerah yakni **“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif”**. Dalam mewujudkan misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan mempunyai 2 (dua) Sasaran yaitu : Meningkatnya realisasi investasi daerah dan Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi.

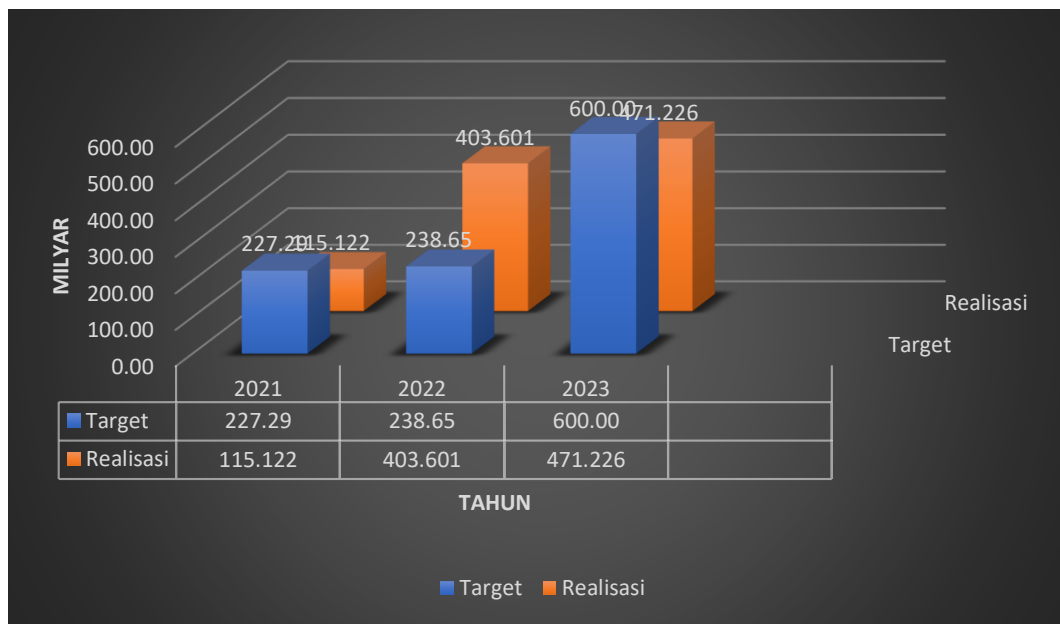
Adapun sasaran yang pertama Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah dengan indikator kinerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu : Nilai Realisasi Investasi

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	600 Milyar	471,226 Milyar	78,53%	Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Nilai Realisasi Investasi tahun 2023 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

- Realisasi Investasi pada tahun 2023 sebagaimana tabel adalah sebesar 471,226 Milyar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) dengan realisasi 403,601 Milyar, hal ini berarti ada peningkatan pada pencapaian di tahun 2023 yakni sebesar 67,625 Milyar.
- Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator nilai realisasi investasi ini dapat dikatakan tinggi.



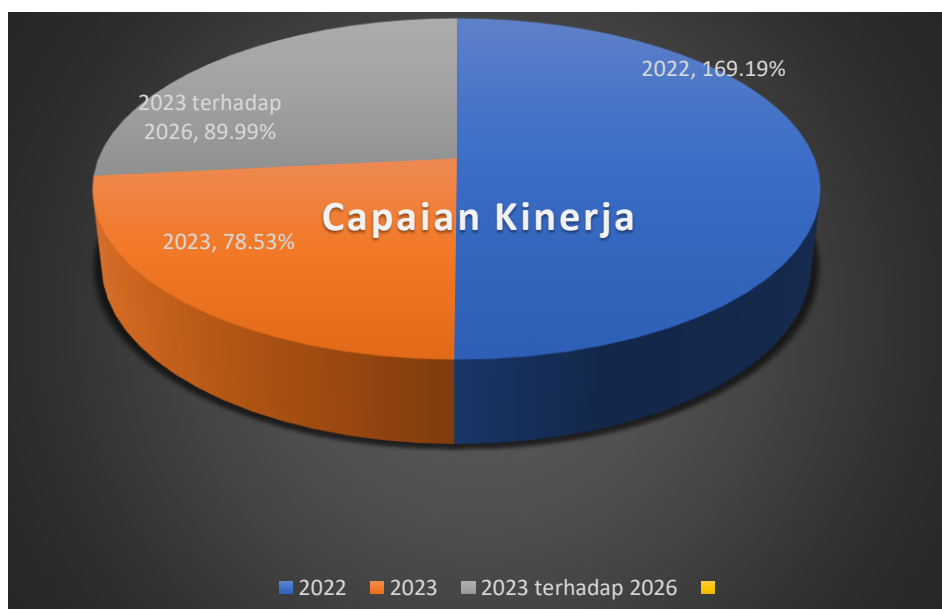
Grafik Nilai Realisasi Investasi

Tabel Capaian Kinerja Indikator Nilai Realisasi Investasi

Indikator	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Realisasi Investasi	169,19 %	600 Milyar	471,226 Milyar	78,53%	89,99 %
Rata-rata Capaian				78,53%	89,99 %

- Jika dibandingkan capaian kinerja Nilai Realisasi Investasi tahun 2023 dengan capaian akhir RPJMD tahun 2026 sebagaimana tabel maka sudah mencapai angka 89,99%.
- Realisasi target pencapaian kinerja tahun 2023 yang di dapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar Rp. 471.226.861.079,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Pulu Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2022 Realisasi investasinya

sebesar Rp. 403.601.380.621,00 (Empat Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribuan Enam Ratus Dua Pulu Satu Rupiah). Disini terjadi mengalami peningkatan sebesar 67.625.480.458,00 Milyar.



Grafik Capaian Kinerja Nilai Realisasi Investasi

Analisa Kendala Investasi Daerah

1. Banyak para pelaku usaha masih enggan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tidak ingin diketahui besaran investasi usahanya dan khawatir jika dihubungkan dengan besaran pajak.
3. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kewajiban penyampaian LKPM dan sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang lalai menyampaikan kewajibannya.
4. PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM mengklasifikasi kriteria UMKM;
 - a) Permodalan usaha mikro paling banyak 1 milyar rupiah dan hasil penjualan paling banyak 2 milyar,
 - b) Permodalan usaha kecil antara 1 sampai 5 milyar rupiah dan hasil penjualan 2 sampai 15 milyar, dan

- c) Permodalan usaha menengah antara 5 sampai 10 milyar rupiah hasil penjualan 15 sampai 50 milyar. LKPM tidak wajib dilaporkan oleh usaha berkategori mikro, sehingga banyak usaha mikro di kabupaten Balangan yang tidak menyumbang besaran realisasi penanaman modal.
- 5. Beberapa pelaku usaha belum migrasi ke OSS RBA dan lupa password dan username akun OSSnya sehingga hal ini menghambat penyampaian LKPM.
- 6. Pada saat kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaku usaha, beberapa kendala yang ditemui antara lain;
 - a) tidak adanya alamat kantor yang jelas,
 - b) kesulitan dalam menemui pimpinan perusahaan/pemilik usaha.

Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Upaya yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan ;

- 1. Melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan LKPM bagi pelaku usaha.
- 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan berusaha dan kiat-kiat berinvestasi bagi para pelaku usaha.
- 3. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam penyampaian LKPM.
- 4. Memberikan asistensi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam memohon perizinan berusaha.
- 5. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha dan DPMPTSP melalui kanal media sosial sehingga informasi terkait investasi/penanaman modal dapat dikomunikasikan dengan cepat.
- 6. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, khususnya bagi pelaku usaha yang dapat ditemui.

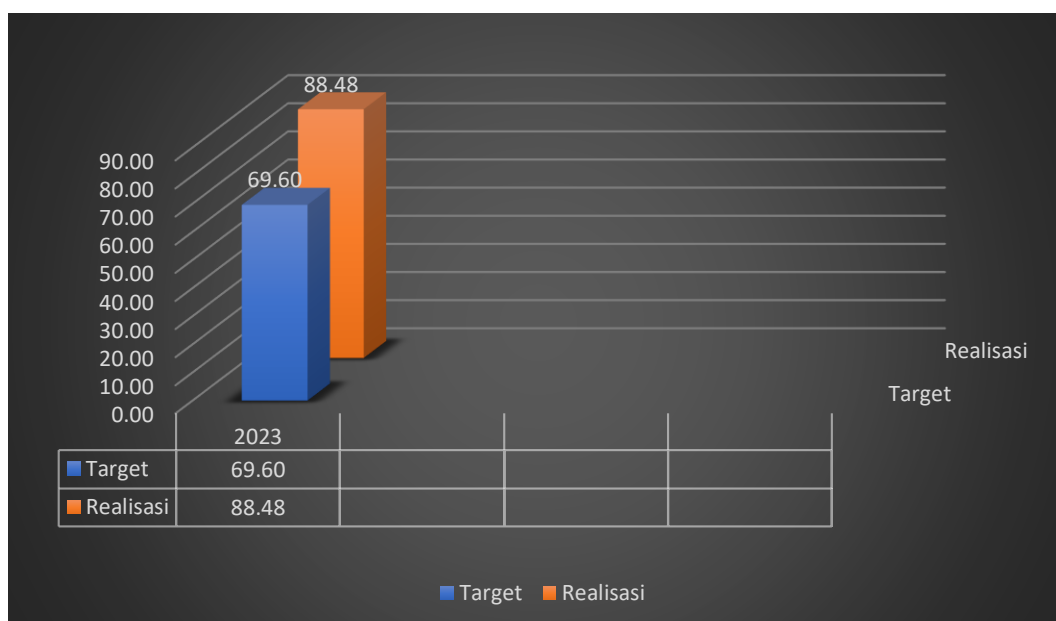
Selanjutnya untuk sasaran yang kedua Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB).

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2023			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	69,6	88,48	127,12%	Sangat Tinggi

Kondisi yang digambarkan pada indikator sasaran Indeks Kemudahan Berinvestasi tahun 2023 sesuai dengan tabel sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah 88,48.
2. Melihat tabulasi kategori indikator capaian kinerja, maka indikator Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB) ini dapat dikatakan sangat tinggi.

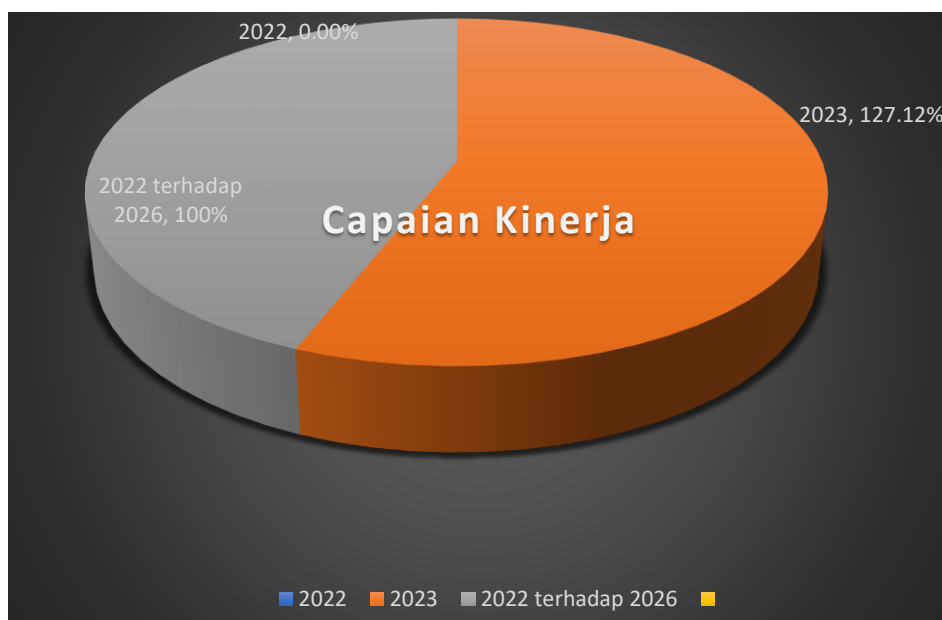


Grafik Realisasi Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB)

Tabel Capaian Kinerja Indikator Realisasi Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB)

Sasaran	Indikator	2022	2023			Capaian 2023 terhadap 2026
		Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	0	69,6	88,48	127,12 %	100%
Rata-rata Capaian					127,12%	100%

- Nilai Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB) Tahun 2023 adalah 88,48 dengan capaian 127,12% dengan kategori Sangat Tinggi.
- Indikator Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB), Nilai/Capaian nya diperoleh dari hasil Penilaian Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha oleh Kementerian Investasi/BKPM RI.
- Indikator ini baru dilaksanakan pada tahun 2023, yang didapat dari hasil rewiw Menpan RB Tahun 2023. Yang mana indikator sebelumnya tahun 2022 adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.



Grafik Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB)

Upaya yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dalam upaya meningkatkan Nilai Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB) diantaranya:

1. Menjadikan hasil Survey Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB) sebagai salah satu wadah evaluasi kinerja pelayanan dan pendorong inovasi pelayanan.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Balangan telah bekerjasama dengan Bank Kalsel dan Bank Pembangunan Rakyat untuk memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga 0% bagi pelaku usaha mikro
3. DPMPTSP Kabupaten Balangan telah menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) yang dirancang untuk mempermudah proses perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Adapun kemudahan dan manfaat bagi pelaku usaha yang menggunakan system OSS, antara lain :
 - a. Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mendapatkan Izin Usaha (NIB) dalam waktu singkat tanpa biaya.
 - b. Proses pembuatan Izin Berusaha (NIB) dapat di akses di mana saja, tanpa perlu memberikan dokumen fisik.
 - c. Pelaku usaha dapat dengan mudah memperpanjang izin usaha yang sudah habis masa berlakunya atau memperbaharui data perusahaan, tanpa mengajukan ulang dari awal.
4. Selalu memperhatikan dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat dilihat dalam tabel T-C.30 di bawah ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Investasi	400 M	600 M	610 M	615 M		471,226 M	610 M	615 M	
2	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)		Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)		69,6	70,5	71		88,48	70,5	71	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Adapun Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara garis besar ada beberapa permasalahan - permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah :

1. Investasi saat ini mengarah ke dua sektor utama yakni Pertambangan (untuk PMA) dan Jasa Lainnya (untuk PMDN). Kedua sektor ini hingga saat ini hampir tidak memiliki keterkaitan ke depan maupun ke belakang (multiplier-nya terhadap kesejahteraan masyarakat rendah).
2. Belum ada Peraturan Daerah tentang kemudahan berinvestasi.
3. Belum memiliki KAPET (Kawasan Ekonomi Terpadu) yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memasarkan investasi kepada Investor baik itu investor lokal maupun investor Asing.
4. Belum dibuatnya Mal Pelayanan Publik dalam rangka memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
5. Update data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data yang akurat.

Isu-isu strategi berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
2. Melaksanakan Koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD terkait
3. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Daerah.
4. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas.

5. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025, merupakan tahun ke lima RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang disusun dan ditetapkan setelah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan. Secara keseluruhan, Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 di bawah ini:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 2025	KEBUTUHAN DANA (Rp)	LOKASI	
1	3	4	8	9	10						11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	71,60 (BB) Nilai	8,472,528,000.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	71,60 (BB) Nilai	8,560,958,909.00		
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	390,000,000.00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	349,624,000.00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	120,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	92,882,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	110,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	106,902,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	50,720,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

4	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1 Dokumen	99,120,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	5,614,000,000.00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	5,575,186,802.00		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	23 Orang/bulan	4,794,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	23 Orang/bulan	4,944,936,538.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	720,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	553,537,264.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	40,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	40,507,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	4 Dokumen	60,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	4 Dokumen	36,206,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	290,000,000.00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	295,740,000.00		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	60 Paket	90,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan,	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	60 Paket	163,514,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan,	

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

					Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	50 Orang	200,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	50 Orang	132,226,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	681,528,000.00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	746,092,207.00		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	50,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	43,889,700.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	20 Paket	73,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	20 Paket	64,676,200.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	8,528,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	10,118,400.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	200 Laporan	550,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	200 Laporan	627,407,907.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan</i>	100%	450,000,000.00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan</i>	100%	184,119,800.00		

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	50,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	2 Unit	74,698,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	20 Unit	200,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	20 Unit	15,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	200,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	20 Unit	94,421,800.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	588,000,000.00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	746,269,200.00		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	228,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	361,822,800.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	360,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	384,446,400.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	459,000,000.00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik</i>	100%	663,926,900.00		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	20 Unit	309,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	20 Unit	490,257,700.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan,	

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			Semua Kel/Desa	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>			Semua Kel/Desa	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	150,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	173,669,200.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Potensi Investasi yang terealisasi</i>	100 %	647,672,000.00		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru</i>	1 Potensi	547,672,000.00		
A	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha</i>	100%	177,672,000.00		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha</i>	100%	177,672,000.00		
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	95,766,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	95,766,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	1 Dokumen	81,906,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	1 Dokumen	81,906,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>	1 Potensi	470,000,000.00		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>	1 Potensi	370,000,000.00		
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

2	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>	1 Daerah	170,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>	1 Daerah	70,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Nilai persetujuan investasi/ Rencana Investasi</i>	400 M Rp	546,000,000.00		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi</i>	400 M Rp	713,896,800.00		
A	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan</i>	2 Proyek	546,000,000.00		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan</i>	2 Proyek	713,896,800.00		
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	316,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	384,811,900.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	2 Dokumen	230,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	2 Dokumen	329,084,900.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	88,7 Nilai	954,800,000.00		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	88,7 Nilai	4,505,022,100.00		
A	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar</i>	100%	954,800,000.00		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar</i>	100%	4,505,022,100.00		

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPSTSP Kabupaten Balangan

1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	700 Pelaku Usaha	694,800,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	700 Pelaku Usaha	4,015,336,500.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
2	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	50 Pelaku Usaha	193,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	50 Pelaku Usaha	191,738,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	700 Kegiatan Usaha	67,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	700 Kegiatan Usaha	297,947,600.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM</i>	90 %	289,000,000.00		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM</i>	90 %	343,000,000.00		
A	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM</i>	100 Pelaku Usaha	289,000,000.00		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM</i>	100 Pelaku Usaha	343,000,000.00		
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	5 Kegiatan Usaha.	15,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	5 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Rencana Kerja Tahun 2025
DPMPTSP Kabupaten Balangan

2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	100 Pelaku Usaha	119,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	100 Pelaku Usaha	119,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	40 Kegiatan Usaha	155,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	40 Kegiatan Usaha	209,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal</i>	100 %	190,000,000.00		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal Yang Dikelola Secara Elektronik</i>	100 %	286,650,000.00		
A	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</i>	100%	190,000,000.00		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</i>	100%	286,650,000.00		
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	6 Dokumen	190,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	6 Dokumen	286,650,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
				11,100,000,000.00					14,957,199,809.00		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN SINERGITAS KEBIJAKAN DAERAH

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah, fungsi strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satu instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Balangan yang perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat dikerja dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang disusun di gunakan untuk memetakan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah,waktu yang cepat dan biaya transparan. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan

perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Permendagri No 40 Tahun 2020

Prioritas Bidang Pembangunan Nasional

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal.
2. Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran dalam penerapan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan adalah dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang harus dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan .

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan tidaklah lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 yang ada pada Misi II dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perkebunan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif

Adapun tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah ***Terwujudnya Investasi Daerah yang Berkelanjutan***, dengan indikator tujuan

Persentase Peningkatan Investasi Daerah dan target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 15%.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah;
dengan indikator sasaran : Nilai realisasi investasi
2. Meningkatnya kemudahan berinvestasi
dengan indikator sasaran : Indeks kemudahan berinvestasi (EoDB)

Target Pembangunan Nasional

- a. Nilai realisasi penanaman modal Rp 991,3 triliun;
- b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
- c. Perusahaan besar yang bermitra dengan usaha mikro, kecil menengah :
120 perusahaan;
- d. Sebaran penanaman modal yang berkualitas (di luar Jawa) : 46,9%;
- e. Nilai komitmen hasil promosi investasi terfokus sektor dan negara : Rp
1.652,2 triliun;
- f. Kontribusi investasi dalam negeri/ PMDN termasuk usaha mikro, kecil
menengah; 47,8 %;
- g. Peringkat kemudahan berusaha: 55 (Peringkat EoDB).

Hal – Hal yang Harus Diperhatikan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menyusun RKPD 2025

- a. Pengawasan realisasi investasi di daerah.
- b. Perlunya hilirisasi sumber daya alam di daerah.
- c. Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional
khususnya usaha mikro, kecil menengah di daerah proyek.
- d. Mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja.
- e. Mendorong investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.
- f. Promosi investasi terfokus berdasarkan sector dan yang sejalan dengan
prioritas nasional.

- g. Mendorong peningkatan investasi dalam negeri/ PMDN khususnya usaha mikro, kecil menengah.
- h. Penyederhanaan Perizinan di daerah.

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar publik/investor
2. Memutus rantai “perantara/calor” dalam pengurusan perizinan dan non perizinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah waktu penyelesaian yang cepat dan biaya yang transparan.
3. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk memujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
4. Pelayanan yang ramah mudah cepat dan transparan serta tanggapan dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas pelayanan perizinan dan non perizinan yang di terima masyarakat.
5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan selaras terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Balangan. Koordinasi dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas/Instansi Teknis dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan kompetensi integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
7. Pembinaan/ pengawasan dan monev.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan

terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Salah satu faktor yang jadi pertimbangan dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan di tahun 2025 adalah melanjutkan visi dan misi dari kepala daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumberdaya manusia ,melalui misi mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sehingga dalam pembuatan rumusan program dan kegiatan tersebut lebih difokuskan pada penajaman IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah berupa peningkatan investasi daerah.

Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merencanakan sebanyak 6 program, 13 kegiatan yang terdiri dari 35 Sub Kegiatan. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyelenggaraan Walida Pendukung Statistik Sektorial Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- **Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- **Sub Kegiatan**

- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Mebel
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Sub Kegiatan**

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

A. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- **Sub Kegiatan**

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- **Sub Kegiatan**

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
- 3) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- **Sub Kegiatan**

- 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan

- 1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan BerUsaha Berbasis Resiko
- 3) Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan

- 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya
- 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
- 3) Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun 2025 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, Renja Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulam masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Alokasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BALANGAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			14,957,199,809.00							11,057,122,616.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14,957,199,809.00							11,057,122,616.00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			14,957,199,809.00							11,057,122,616.00	
I	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	71,60 (BB) Nilai	8,560,958,909.00						-	8,659,790,616.00	
A	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	349,624,000.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	500,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	92,882,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		170,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	106,902,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		170,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	50,720,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		60,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	1 Dokumen	99,120,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
B	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	5,575,186,802.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	5,714,790,616.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	23 Orang/bulan	4,944,936,538.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		4,894,790,616.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	553,537,264.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		720,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12 Dokumen	40,507,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		40,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	4 Dokumen	36,206,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		60,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
C	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	295,740,000.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	300,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	163,514,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	132,226,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		200,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
D	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	746,092,207.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	688,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	43,889,700.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	64,676,200.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		73,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,118,400.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	627,407,907.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		550,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
E	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	184,119,800.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	510,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	74,698,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	15,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		230,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	94,421,800.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		230,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
F	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	746,269,200.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	488,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	361,822,800.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		228,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	384,446,400.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		260,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
G	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	663,926,900.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	459,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	490,257,700.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		309,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	40 Unit	173,669,200.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		150,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
II	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi	547,672,000.00						-	517,532,000.00	
A	2.18.02.2.01	<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha</i>	100%	177,672,000.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Invest or	-	197,532,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	95,766,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Invest or		105,766,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	1 Dokumen	81,906,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Invest or		91,766,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
B	2.18.02.2.02	<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>	1 Potensi	370,000,000.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Invest or	-	320,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Invest or		0.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>	1 Daerah	70,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Invest or		170,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	150,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk	Invest or		150,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

						Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL		Unggulan dan Daya Saing UKM				TERPADU SATU PINTU
III	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi/ Rencana Investasi	400 M Rp	713,896,800.00					-		546,000,000.00	
A	2.18.03.2.01	<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan</i>	2 Proyek	713,896,800.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	546,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	384,811,900.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		316,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	2 Dokumen	329,084,900.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		230,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IV	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88,7 Nilai	4,505,022,100.00					-		954,800,000.00	
A	2.18.04.2.01	<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar</i>	100%	4,505,022,100.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	954,800,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	700 Pelaku Usaha	4,015,336,500.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		694,800,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	50 Pelaku Usaha	191,738,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		193,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	700 Kegiatan Usaha	297,947,600.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		67,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
V	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	90 %	343,000,000.00						-	189,000,000.00	
A	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM	100 Pelaku Usaha	343,000,000.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	189,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha	15,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	119,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		19,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 Kegiatan Usaha	209,000,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		155,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
VI	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal Yang Dikelola Secara Elektronik	100 %	286,650,000.00						-	190,000,000.00	

A	2.18.06.2.01	<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi</i>	100%	286,650,000.00			-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	190,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	6 Dokumen	286,650,000.00	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		190,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH				14,957,199,809.00							11,057,122,616.00	

4.2 ANALISIS SOSIAL EKONOMI

Ketika mendengar kata ‘investasi’, mungkin yang terlintas adalah menanamkan aset untuk mendapatkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Namun investasi tidak hanya seputar ekonomi saja, tetapi ada juga yang disebut sebagai investasi sosial. Menurut International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), investasi sosial merupakan bentuk kontribusi perusahaan terhadap masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Tujuannya, untuk memberikan keuntungan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).

International Finance Corporation (IFC) juga mendefinisikan investasi sosial sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan untuk membantu masyarakat di sekitar lokasi operasi perusahaan dan bertujuan untuk pengembangan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga dapat mengambil keuntungan dari peluang yang diciptakan dengan cara yang berkelanjutan dan mendukung tujuan perusahaan.

Salah satu praktik investasi sosial yang saat ini gencar dilakukan adalah corporate social responsibility (CSR) dengan berbagai macam program, yang tentunya berkelanjutan. Praktik ini akan memberikan manfaat pada masyarakat, sebagai target, maupun perusahaan. Berikut beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat (IFC, 2010),

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

Sedangkan berikut ini manfaat bagi perusahaan dari investasi sosial

1. Mendapatkan social license to operate
2. Menjadi bagian dari manajemen risiko sosial dan lingkungan
3. Menciptakan keunggulan yang kompetitif
4. Meningkatkan reputasi perusahaan
5. Menaati dan menjalankan regulasi yang berlaku

6. Kerja sama dengan stakeholder, seperti pemerintah dalam program pembangunan
7. Meningkatkan loyalitas konsumen

Sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, (perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain). Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Untuk melihat kedudukan sosial ekonomi dapat dilihat dari pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan, juga kondisi pemukiman. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi

Kehidupan sosial ekonomi adalah kehidupan sosial yang menunjukkan pada objeknya yaitu masyarakat yang menunjukkan pada kegiatan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan dalam lingkup pekerjaan. Sosial ekonomi merupakan pertanda yang menunjukkan kegiatan ekonomi secara sosial dalam sistem kemasyarakatan, dimana keadaan masyarakat dalam hidupnya baik menyangkut taraf hidup, ilmu pengetahuan, hubungan sosial dan tingkat ekonominya. Perubahan sosial ekonomi juga termasuk didalamnya perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir masyarakat untuk mencapai suatu arah yang lebih baik. Begitupun yang menjadi keinginan dari para Tenaga Kerja Wanita dan keluarganya mereka berharap dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita dapat membawa perubahan pada perekonomian keluarga. Bagi keluarga yang ditinggalkan dengan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita sangat menunjang perekonomian keluarga terbukti mereka dapat membangun rumah ataupun memperbaiki taraf hidup perekonomian keluarga dengan pendapatannya. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran kehidupan masyarakat dari sederhana menjadi modern dan kemampuan mereka menyekolahkan anak-anak mereka.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Renja-SKPD disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab SKPD, dan diharapkan dapat memberikan solusi dalam setiap gerak dan langkah yang akan ditempuh, agar tidak terjadinya berbagai hambatan. Rencana Kerja ini secara umum menguraikan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan serta indikator kinerja untuk program yang dinyatakan dalam sasaran hasil (*outcomes*).

Esensinya, dengan mempedomani Rencana Kerja ini dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana telah tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan diharapkan Tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan dapat terlaksana dalam upaya meningkatkan kinerja SKPD, terutama dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan program Pemerintah Kabupaten dan dapat mendukung pencapaian Target PAD Tahun 2025.

FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
2.18.2.07.3.32.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun	
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12		13-12/7x100%		14-6+12		15-14/5x100%	
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	30 %	321,422,000	100 %	52,598,600	25 %	0	0 %	0	0 %	18,999,000	100 %	46,528,500	100 %	46,528,500	100.00	88.46	100 %	46,528,500.00	333.33	14.48
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK	70 %	321,422,000	80 %	52,598,600	69 %	0	0 %	0	0 %	18,999,000	80 %	46,528,500	80 %	46,528,500	100.00	88.46	80 %	46,528,500.00	114.29	14.48
1.	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	321,422,000	1 Dokumen	23,569,800	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	8,688,000	1 Dokumen	20,600,000	1 Dokumen	20,600,000	100.00	87.40	2 Dokumen	138,299,208.00	200.00	43.03
2.	2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	0	10 Perusahaan	29,028,800	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	10,311,000	10 Perusahaan	25,928,500	10 Perusahaan	25,928,500	100.00	89.32	10 Perusahaan	25,928,500.00	20.00	0.00
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dinas Kerja	100 %	36,715,697,734	60 %	14,119,215,100	0 %	150,220,224	0 %	271,795,024	0 %	718,415,005	89.57 %	13,847,971,207	89.57 %	13,847,971,207	149.28	98.08	89.57 %	13,847,971,207.00	89.57	37.72
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	100 %	35,820,547,734	24 %	3,430,970,100	28.57 %	109,891,000	78.57 %	207,808,800	90 %	584,418,314	97 %	3,172,802,016	97 %	3,172,802,016	404.17	92.48	97 %	3,172,802,016.00	97.00	8.86
3.	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kebutuhan Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N	1344 Orang	14,166,241,384	224 Orang	2,722,240,100	64 Orang	107,571,000	176 Orang	205,488,800	0 Orang	582,098,314	224 Orang	2,469,328,361	224 Orang	2,469,328,361	100.00	90.71	448 Orang	3,201,001,360.00	33.33	22.60
4.	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan	10 Lembaga	2,079,000,000	4 Lembaga	708,730,000	0 Lembaga	2,320,000	0 Lembaga	2,320,000	0 Lembaga	2,320,000	4 Lembaga	703,473,605	4 Lembaga	703,473,605	100.00	99.26	7 Lembaga	980,872,655.00	70.00	47.18
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang terakreditasi	100 %	511,450,000	100 %	3,289,160,000	0 %	30,991,612	0 %	38,448,612	0 %	67,835,968	100 %	3,282,927,968	100 %	3,282,927,968	100.00	99.81	100 %	3,282,927,968.00	100.00	641.89
5.	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terakreditasi	10 LPK	511,450,000	2 LPK	3,289,160,000	0 LPK	30,991,612	0 LPK	38,448,612	0 LPK	67,835,968	2 LPK	3,282,927,968	2 LPK	3,282,927,968	100.00	99.81	4 LPK	3,373,772,168.00	40.00	659.65
			Jumlah LPKS yang Dibina	35 Lembaga		35 Lembaga		0 Lembaga	35 Lembaga		0 Lembaga		0 Lembaga	35 Lembaga		100.00		35.00			100.00		
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100 %	383,700,000	100 %	95,085,000	0 %	9,337,612	0 %	25,537,612	0 %	66,160,723	100 %	89,329,723	100 %	89,329,723	100.00	93.95	100 %	89,329,723.00	100.00	23.28
6.	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	383,700,000	22 Perusahaan	95,085,000	0 Perusahaan	9,337,612	20 Perusahaan	25,537,612	0 Perusahaan	66,160,723	22 Perusahaan	89,329,723	22 Perusahaan	89,329,723	100.00	93.95	32 Perusahaan	165,805,323.00	64.00	43.21
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensi dan	3000 orang	0	1220 orang	7,304,000,000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	1212 orang	7,302,911,500	1212 orang	7,302,911,500	99.34	99.99	1212 orang	7,302,911,500.00	40.40	0.00
7.	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	4 Dokumen	0	1 Dokumen	7,304,000,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7,302,911,500	1 Dokumen	7,302,911,500	100.00	99.99	1 Dokumen	7,302,911,500.00	25.00	0.00
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	65 %	1,357,872,500	65 %	1,255,473,500	6.69 %	590,626,800	0 %	742,370,300	0 %	794,598,600	63.27 %	1,211,502,771	63.27 %	1,211,502,771	97.34	99.66	63.27 %	1,211,502,771.00	97.34	89.22
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	100 %	1,357,872,500	100 %	1,132,524,200	0 %	585,520,000	0 %	684,688,100	0 %	722,003,100	100 %	1,113,152,071	100 %	1,113,152,071	100.00	102.39	165.71 %	1,331,804,475.00	165.71	98.08
6.	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAP dan AKI	600 Orang	760,282,500	60 Orang	112,234,200	24 Orang	58,000,000	0 Orang	68,001,500	0 Orang	91,270,500	60 Orang	106,131,100	60 Orang	106,131,100	100.00	94.56	70 Orang	233,360,906.00	11.67	30.69
9.	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	0	331 Orang	701,448,000	75 Orang	525,000,000	0 Orang	612,506,600	0 Orang	612,506,600	331 Orang	699,232,715	331 Orang	699,232,715	100.00	99.68	331 Orang	699,232,715.00	331.00	0.00
10.	2.07.04.2.01.04	Penyenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketrageakerjaan	Jumlah tenaga kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Jajangan LLD	25 Orang	298,195,000	5 Orang	27,500,800	0 Orang	0	0 Orang	0	5 Orang	2,436,000	0 Orang	21,589,100	5 Orang	21,589,100	100.00	78.50	10 Orang	55,279,900.00	40.00	18.54
11.	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	100 Orang	299,395,000	40 Orang	291,341,200	0 Orang	2,520,000	0 Orang	4,180,000	0 Orang	15,790,000	40 Orang	286,199,156	40 Orang	286,199,156	100.00	116.34	60 Orang	343,930,954.00	60.00	114.88
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Kabupaten/Balangan	Persentase LPTKS yang memiliki izin/terdaftar di Kabupaten Balangan	100 LPTKS	0	100 LPTKS	11,428,800	0 LPTKS	0	0 LPTKS	0	0 LPTKS	0	100 LPTKS	2,750,000	100 LPTKS	2,750,000	100.00	24.06	100 LPTKS	2,750,000.00	100.00	0.00
12.	2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	8 Lembaga	0	2 Lembaga	11,428,800	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	2 Lembaga	2,750,000	2 Lembaga	2,750,000	100.00	24.06	2 Lembaga	2,750,000.00	25.00	0.00
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase dokumen informasi pasar kerja	100 %	0	100 %	91,939,300	25 %	5,106,800	25 %	57,682,200	25 %	62,859,500	25 %	78,724,700	25 %	78,724,700	25.00	80.84	25 %	78,724,700.00	25.00	9.00

13.	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi Informasi pasar kerja Online	48 Dokumen	0	12 Dokumen	12,105,700	3 Dokumen	0	3 Dokumen	2,890,400	3 Dokumen	4,611,700	12 Dokumen	10,575,600	12 Dokumen	10,575,600	100.00	87.36	12 Dokumen	10,575,600.00	25.00	0.00
14.	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 Orang	0	10 Orang	79,833,600	0 Orang	5,106,800	0 Orang	54,791,800	10 Orang	58,247,800	0 Orang	68,149,100	10 Orang	68,149,100	100.00	79.92	10 Orang	68,149,100.00	25.00	0.00
15.	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pria dan Perempuan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI/CPMI/Masyarakat yang mendapatkan layanan	100 %	0	100 %	19,581,200	0 %	0	0 %	0	0 %	9,736,000	100 %	16,876,000	100 %	16,876,000	100.00	86.18	100 %	16,876,000.00	100.00	9.00
15.	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	40 Orang	0	10 Orang	14,141,200	0 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	4,944,000	0 Orang	11,464,000	10 Orang	11,464,000	100.00	81.07	10 Orang	11,464,000.00	25.00	0.00
16.	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	60 Orang	0	0 Orang	5,440,000	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	4,792,000	0 Orang	5,412,000	0 Orang	5,412,000	0.00	99.49	0 Orang	5,412,000.00	0.00	0.00
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100 %	2,113,240,000	100 %	4,267,296,100	0 %	48,074,856	100 %	586,132,378	0 %	1,964,282,061	0 %	4,105,114,992	100 %	4,105,114,992	100.00	96.20	100 %	4,105,114,992.00	100.00	194.26
17.	2.07.05.2.01	Pencegahan dan Pendaftaran Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100 %	649,160,000	100 %	3,889,885,400	0 %	32,013,244	0 %	474,508,444	0 %	1,818,592,171	100 %	3,732,068,003	100 %	3,732,068,003	100.00	95.94	100 %	3,732,068,003.00	100.00	574.91
17.	2.07.05.2.01.03	Penyediaan dan Pendaftaran Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	5 Laporan	649,160,000	1 Laporan	3,889,885,400	0 Laporan	32,013,244	0 Laporan	474,508,444	1 Laporan	1,818,592,171	0 Laporan	3,732,068,003	1 Laporan	3,732,068,003	100.00	95.94	2 Laporan	3,839,953,682.00	40.00	591.53
18.	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kesejahteraan Buruh/Karyawan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator	100 %	1,464,080,000	100 %	377,410,700	0 %	16,061,612	100 %	111,623,934	0 %	145,689,890	100 %	373,046,989	100 %	373,046,989	100.00	98.84	100 %	373,046,989.00	100.00	25.48
18.	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kesejahteraan Buruh/Karyawan	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	1,241,850,000	3 Perkara	195,145,000	0 Perkara	6,230,000	1 Perkara	54,224,000	1 Perkara	69,114,239	3 Perkara	194,451,338	3 Perkara	194,451,338	100.00	99.64	3 Perkara	194,451,338.00	100.00	15.66
19.	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kesejahteraan Buruh/Karyawan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Teselesaikan	3 Perkara	222,230,000	3 Perkara	16,690,000	0 Perkara	2,924,000	1 Perkara	10,892,322	0 Perkara	14,456,322	3 Perkara	16,096,322	3 Perkara	16,096,322	100.00	96.44	6 Perkara	53,046,722.00	0.00	23.87
20.	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	0	1 Lembaga	165,575,700	0 Lembaga	6,907,612	1 Lembaga	46,507,612	0 Lembaga	62,119,329	0 Lembaga	162,499,329	1 Lembaga	162,499,329	100.00	98.14	1 Lembaga	162,499,329.00	25.00	0.00
5.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	75 (BB)	56,938,049,930	71.2 (BB)	13,022,289,529	0 (BB)	525,396,389	0 (BB)	5,556,564,914	0 (BB)	8,296,294,154	0 (BB)	12,505,385,993	0 (BB)	12,553,768,793	0.00	97.01	0 (BB)	12,505,385,993.00	0.00	21.96
17.	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100 %	614,483,748	100 %	149,461,800	0 %	3,025,000	25 %	23,423,000	75 %	68,724,409	100 %	126,207,045	100 %	140,126,045	100.00	84.36	100 %	126,207,045.00	100.00	20.54
21.	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	75,717,500	2 Dokumen	23,185,000	1 Dokumen	1,150,000	1 Dokumen	7,064,000	0 Dokumen	13,635,409	2 Dokumen	22,390,409	2 Dokumen	22,390,409	100.00	96.57	4 Dokumen	41,283,681.00	33.33	54.52
22.	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKa-SKPD	Jumlah Dokumen RKa- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKa- SKPD	6 Dokumen	82,886,621	1 Dokumen	17,185,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6,434,000	0 Dokumen	13,919,000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13,919,000	100.00	81.00	2 Dokumen	26,749,000.00	33.33	32.27
23.	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	6 Dokumen	61,106,925	1 Dokumen	17,635,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	3,440,000	1 Dokumen	16,663,000	0 Dokumen	16,893,000	1 Dokumen	16,893,000	100.00	95.79	2 Dokumen	24,677,800.00	33.33	40.38
24.	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	283,623,470	2 Laporan	54,105,000	1 Laporan	1,875,000	1 Laporan	6,485,000	0 Laporan	15,571,000	2 Laporan	49,773,833	2 Laporan	49,773,833	100.00	91.99	4 Laporan	87,916,833.00	33.33	31.00
25.	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	36,322,654	2 Laporan	37,491,800	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	8,936,000	2 Laporan	37,149,803	2 Laporan	37,149,803	100.00	99.09	4 Laporan	49,460,653.00	200.00	136.17
17.	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 %	46,173,496,862	100 %	8,797,640,778	25 %	200,076,680	25 %	4,441,853,058	75 %	6,522,080,983	100 %	8,483,381,911	100 %	8,517,845,711	100.00	96.43	100 %	8,483,381,911.00	100.00	18.37
26.	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	44,075,162,928	44 Orang/Bulan	7,331,662,778	44 Orang/Bulan	0	44 Orang/Bulan	3,846,561,258	42 Orang/Bulan	5,464,445,506	42 Orang/Bulan	7,066,075,394	42 Orang/Bulan	7,066,075,394	95.45	96.38	85 Orang/Bulan	13,074,282,143.00	170.00	29.66
27.	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,879,440,547	12 Dokumen	1,386,968,000	3 Dokumen	193,466,680	6 Dokumen	562,377,800	9 Dokumen	1,005,939,477	12 Dokumen	1,376,084,317	12 Dokumen	1,376,084,317	100.00	99.22	24 Dokumen	1,871,735,581.00	200.00	99.59
28.	2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	6 Dokumen	45,132,229	1 Dokumen	35,005,000	0 Dokumen	3,305,000	0 Dokumen	25,439,000	1 Dokumen	34,463,800	0 Dokumen	0	1 Dokumen	34,463,800	100.00	98.45	2 Dokumen	40,687,800.00	33.33	90.15
29.	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Laporan	50,882,229	1 Laporan	44,005,000	0 Laporan	3,305,000	0 Laporan	7,475,000	0 Laporan	17,232,200	1 Laporan	41,222,200	1 Laporan	41,222,200	100.00	93.68	2 Laporan	49,326,600.00	33.33	96.94

2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %	1,292,534,702	100 %	351,932,500	25 %	0	75 %	15,045,700	0 %	15,045,700	100 %	327,373,600	100 %	327,373,600	100.00	93.02	100 %	327,373,600.00	100.00	25.33
30. 2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	279,788,046	50 Paket	161,282,500	0 Paket	0	50 Paket	15,045,700	0 Paket	15,045,700	50 Paket	158,683,200	50 Paket	158,683,200	100.00	98.39	100 Paket	203,933,200.00	200.00	72.89
31. 2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1,012,746,656	44 Orang	190,650,000	20 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	44 Orang	168,690,400	44 Orang	168,690,400	100.00	0.00	44 Orang	0.00	88.00	0.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1,882,477,432	100 %	1,404,687,850	25 %	131,028,600	25 %	206,691,000	25 %	460,301,999	100 %	1,346,101,123	100 %	1,346,101,123	100.00	95.83	100 %	1,346,101,123.00	100.00	71.51
32. 2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	133,673,497	1 Paket	45,639,100	1 Paket	0	1 Paket	0	0 Paket	8,996,100	0 Paket	45,639,100	1 Paket	45,639,100	100.00	100.00	2 Paket	65,844,500.00	200.00	49.26
33. 2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58,730,500	1 Paket	670,387,150	1 Paket	65,800,000	1 Paket	96,604,400	0 Paket	138,904,400	0 Paket	620,951,400	1 Paket	620,951,400	100.00	92.63	2 Paket	660,951,400.00	200.00	1,125.40
34. 2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	242,175,477	1 Paket	76,471,100	1 Paket	10,000,000	1 Paket	0	0 Paket	19,962,400	0 Paket	74,244,700	1 Paket	74,244,700	100.00	97.09	2 Paket	145,382,800.00	200.00	60.03
35. 2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	26,110,400	1 Dokumen	19,866,300	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	19,866,300	1 Dokumen	19,866,300	100.00	0.00	2 Dokumen	4,000,000.00	200.00	15.32
36. 2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1,421,787,558	75 Laporan	592,324,200	32 Laporan	55,228,600	45 Laporan	110,086,600	76 Laporan	292,439,099	75 Laporan	585,399,623	75 Laporan	585,399,623	100.00	98.83	150 Laporan	1,002,536,599.00	25.00	70.51
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan barang yang terpenuhi	100 %	0	100 %	242,446,200	0 %	0	0 %	0	0 %	35,760,000	100 %	223,706,200	100 %	223,706,200	100.00	200.73	100 %	223,706,200.00	100.00	9.00
37. 2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipestakan	10 Unit	0	7 Unit	174,000,000	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	35,760,000	7 Unit	155,260,000	7 Unit	155,260,000	100.00	361.07	7 Unit	155,260,000.00	70.00	0.00
38. 2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	2 Unit	68,446,200	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	68,446,200	2 Unit	68,446,200	100.00	100.00	2 Unit	68,446,200.00	20.00	0.00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	4,339,973,704	12 Bulan	923,333,501	3 Bulan	111,343,123	6 Bulan	257,028,035	9 Bulan	454,999,846	12 Bulan	880,570,973	12 Bulan	880,570,973	100.00	95.37	12 Bulan	880,570,973.00	16.67	20.29
39. 2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	2,377,165,455	12 Laporan	412,196,401	3 Laporan	62,403,023	6 Laporan	150,867,935	9 Laporan	278,536,546	12 Laporan	373,903,873	12 Laporan	373,903,873	100.00	90.71	24 Laporan	729,465,370.00	33.33	30.69
40. 2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1,962,808,249	12 Laporan	511,137,100	3 Laporan	48,940,100	6 Laporan	106,160,100	9 Laporan	176,463,300	12 Laporan	506,667,100	12 Laporan	506,667,100	100.00	99.13	24 Laporan	916,004,600.00	33.33	46.67
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	2,635,083,402	12 Bulan	1,152,646,900	3 Bulan	79,922,986	6 Bulan	612,524,121	9 Bulan	739,381,217	12 Bulan	1,118,045,141	12 Bulan	1,118,045,141	100.00	97.00	12 Bulan	1,118,045,141.00	16.67	42.43
41. 2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipestakan dan Dibayarkan Biaya Pemeliharaan	31 Unit	2,055,726,088	31 Unit	395,596,900	9 Unit	56,602,986	15 Unit	149,064,121	0 Unit	215,251,217	33 Unit	375,717,363	33 Unit	375,717,363	106.45	94.97	64 Unit	752,975,639.00	206.45	36.63
42. 2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipestakan/Rehabilitasi	2 Unit	579,357,394	2 Unit	757,050,000	0 Unit	23,320,000	2 Unit	463,460,000	0 Unit	524,130,000	0 Unit	742,327,778	2 Unit	742,327,778	100.00	98.06	4 Unit	850,567,778.00	200.00	146.81
6. 2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KUM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	6 potensi	658,776,107	1 potensi	195,951,400	0 potensi	0	0 potensi	1,924,000	0 potensi	24,461,235	1 potensi	157,785,291	1 potensi	157,785,291	100.00	80.52	2 potensi	207,091,171.00	33.33	31.44
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Dokumen	280,374,381	1 Dokumen	55,802,400	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1,924,000	0 Dokumen	19,851,235	0 Dokumen	39,752,091	0 Dokumen	39,752,091	0.00	71.11	1 Dokumen	69,040,771.00	100.00	24.62
		PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0.00		0 Dokumen		0.00	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	6 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100.00		1 Dokumen		16.67	
43. 2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 Dokumen	280,374,381	1 Dokumen	6,859,600	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0.00	0.00	0 Dokumen	29,288,680.00	0.00	10.45
44. 2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	0	25 Kegiatan Usaha	49,042,800	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	1,924,000	25 Kegiatan Usaha	19,851,235	0 Kegiatan Usaha	39,752,091	25 Kegiatan Usaha	39,752,091	100.00	81.06	50 Kegiatan Usaha	39,752,091.00	200.00	0.00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	378,401,728	1 Dokumen Peta Potensi	140,049,000	0 Dokumen Peta Potensi	0	0 Dokumen Peta Potensi	0	0 Dokumen Peta Potensi	4,610,000	1 Dokumen Peta Potensi	118,033,200	1 Dokumen Peta Potensi	118,033,200	100.00	84.28	1 Dokumen Peta Potensi	138,050,400.00	100.00	36.48
45. 2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1 Dokumen	294,863,750	1 Dokumen	7,510,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0.00	0.00	0 Dokumen	7,420,000.00	0.00	2.52
46. 2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83,537,976	1 Dokumen	132,539,000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	4,610,000	1 Dokumen	118,033,200	1 Dokumen	118,033,200	100.00	89.06	1 Dokumen	130,630,400.00	100.00	156.37
7. 2.18.03	PROGRAM PRIORITASI PENANAMAN MODAL	Nilai Pensetoran Investasi / Rencana Investasi	1100000000000 Rupiah	385,511,643	2100000000000 Rupiah	3,639,849,000	12398000000 Rupiah	14,497,180	19390100000 Rupiah	23,979,720	4173590000000 Rupiah	28,045,720	4410850000000 Rupiah	3,437,896,150	4410850000000 Rupiah	3,437,896,150	210.04	94.45	8845090000000 Rupiah	3,700,346,660.00	80.41	999.85

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pameran penanaman modal	5 Kegiatan	385,511,643	1 Kegiatan	3,639,849,000	0 Kegiatan	14,497,180	1 Kegiatan	23,979,720	0 Kegiatan	28,045,720	0 Kegiatan	3,437,896,150	1 Kegiatan	3,437,896,150	100.00	94.45	2 Kegiatan	3,700,346,660.00	40.00	959.85
			Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	10 Kegiatan		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0 Kegiatan		0.00		0 Kegiatan		0.00	
47.	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	97,788,603	1 Dokumen	127,758,000	0 Dokumen	13,497,180	0 Dokumen	15,497,180	0 Dokumen	15,497,180	1 Dokumen	123,832,180	1 Dokumen	123,832,180	100.00	96.93	2 Dokumen	136,194,480.00	200.00	139.27
48.	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	287,723,040	2 Dokumen	3,512,091,000	0 Dokumen	1,000,000	1 Dokumen	8,482,540	0 Dokumen	12,548,540	2 Dokumen	3,314,063,970	2 Dokumen	3,314,063,970	100.00	94.36	3 Dokumen	3,564,152,180.00	300.00	1,238.74
8.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan	94 Nilai	812,187,224	88 Nilai	617,437,750	0 Nilai	42,257,600	0 Nilai	60,159,600	0 Nilai	124,886,365	92,25 Nilai	600,643,099	92,25 Nilai	600,643,099	104.83	97.28	92,25 Nilai	600,643,099.00	98.14	73.95
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100 %	812,187,224	100 %	617,437,750	0 %	42,257,600	0 %	60,159,600	0 %	124,886,365	100 %	600,643,099	100 %	600,643,099	100.00	97.28	100 %	600,643,099.00	100.00	73.95
			Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	700 Izin		700 Izin		153 Izin		171 Izin		459 Izin		572 Izin		572 Izin		81.71		572 Izin		81.71	
49.	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	700 Pelaku Usaha	82,222,700	700 Pelaku Usaha	213,337,050	153 Pelaku Usaha	17,522,100	171 Pelaku Usaha	23,892,100	459 Pelaku Usaha	25,332,100	572 Pelaku Usaha	198,768,709	572 Pelaku Usaha	198,768,709	81.71	93.17	1245 Pelaku Usaha	212,768,709.00	177.86	258.77
50.	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman	700 Kegiatan Usaha	137,438,599	700 Kegiatan Usaha	20,248,400	153 Kegiatan Usaha	3,940,000	171 Kegiatan Usaha	11,992,000	459 Kegiatan Usaha	17,276,400	572 Kegiatan Usaha	19,256,400	572 Kegiatan Usaha	19,256,400	81.71	95.10	1245 Kegiatan Usaha	41,746,400.00	177.86	30.37
51.	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	332,591,365	100 Orang	334,084,800	21 Orang	13,398,000	10 Orang	14,318,000	22 Orang	71,320,365	78 Orang	333,114,990	78 Orang	333,114,990	78.00	99.71	154 Orang	382,204,990.00	154.00	114.92
52.	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	700 Kegiatan Usaha	259,934,560	700 Kegiatan Usaha	49,767,500	153 Kegiatan Usaha	7,397,500	171 Kegiatan Usaha	9,957,500	107 Kegiatan Usaha	10,957,500	572 Kegiatan Usaha	49,503,000	572 Kegiatan Usaha	49,503,000	81.71	99.47	1245 Kegiatan Usaha	94,249,000.00	177.86	36.26
9.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	100 %	813,196,532	100 %	535,380,800	25 %	10,880,000	25 %	57,877,200	25 %	259,595,051	100 %	397,844,366	100 %	397,844,366	100.00	74.31	100 %	397,844,366.00	100.00	48.92
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan realisasi penanaman modal	24 Laporan	813,196,532	4 Laporan	535,380,800	1 Laporan	10,880,000	1 Laporan	57,877,200	1 Laporan	259,595,051	4 Laporan	397,844,366	4 Laporan	397,844,366	100.00	74.31	8 Laporan	717,417,566.00	33.33	88.22
53.	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	105,968,781	35 Kegiatan Usaha	14,486,400	7 Kegiatan Usaha	3,000,000	6 Kegiatan Usaha	3,620,000	0 Kegiatan Usaha	8,010,000	41 Kegiatan Usaha	13,816,400	41 Kegiatan Usaha	13,816,400	117.14	95.37	66 Kegiatan Usaha	27,481,600.00	264.00	25.93
54.	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha	391,984,368	300 Pelaku Usaha	395,735,600	7 Pelaku Usaha	4,980,000	244 Pelaku Usaha	44,660,000	0 Pelaku Usaha	228,771,251	323 Pelaku Usaha	283,021,851	323 Pelaku Usaha	283,021,851	107.67	71.52	348 Pelaku Usaha	520,026,951.00	1,392.00	132.67
55.	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	315,243,383	35 Kegiatan Usaha	125,158,800	7 Kegiatan Usaha	2,900,000	6 Kegiatan Usaha	9,597,200	0 Kegiatan Usaha	22,813,800	41 Kegiatan Usaha	101,006,115	41 Kegiatan Usaha	101,006,115	117.14	80.70	66 Kegiatan Usaha	169,909,015.00	264.00	53.90
10.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %	810,737,720	100 %	406,463,400	100 %	9,359,745	100 %	16,803,745	100 %	77,407,745	0 %	401,328,145	100 %	401,328,145	100.00	98.74	100 %	401,328,145.00	100.00	49.50
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100 %	810,737,720	100 %	406,463,400	100 %	9,359,745	100 %	16,803,745	100 %	77,407,745	0 %	401,328,145	100 %	401,328,145	100.00	98.74	100 %	401,328,145.00	100.00	49.50
56.	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi yang Diolah, Dikaji dan	6 Dokumen	810,737,720	6 Dokumen	406,463,400	2 Dokumen	9,359,745	4 Dokumen	16,803,745	0 Dokumen	77,407,745	6 Dokumen	401,328,145	6 Dokumen	401,328,145	100.00	98.74	12 Dokumen	543,850,348.00	200.00	67.08
11.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	100 %	0	100 %	112,275,500	0 %	9,686,000	50 %	30,177,950	0 %	40,347,950	100 %	110,759,893	100 %	110,759,893	100.00	98.65	100 %	110,759,893.00	100.00	0.00
	3.32.03.2.01	Penataan Penyebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	80 Orang	0	20 Orang	112,275,500	0 Orang	9,686,000	10 Orang	30,177,950	10 Orang	40,347,950	20 Orang	110,759,893	20 Orang	110,759,893	100.00	98.65	20 Orang	110,759,893.00	25.00	0.00
57.	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan inkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	1 Laporan	14,985,000	0 Laporan	1,440,000	0 Laporan	4,200,000	1 Laporan	8,493,000	0 Laporan	14,298,000	1 Laporan	14,298,000	100.00	95.42	2 Laporan	14,298,000.00	200.00	0.00

58.	3.32.03.2.01.02	Penyilapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 Dokumen	0	1 Dokumen	97,290,500	0 Dokumen	8,246,000	0 Dokumen	25,977,950	0 Dokumen	31,854,950	1 Dokumen	96,461,893	1 Dokumen	96,461,893	100.00	99.15	2 Dokumen	96,461,893.00	200.00	0.00
12.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSKRASASI	Persentase lahan usaha yang dikelola oleh warga	19.5 %	1,751,681,400	19.05 %	200,142,600	0 %	11,608,000	18.84 %	22,067,000	0 %	176,752,000	0 %	197,762,700	18.84 %	197,762,700	98.90	98.81	18.84 %	197,762,700.00	96.62	11.29
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap	Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 Satuan Permukiman	1,751,681,400	1 Satuan Permukiman	200,142,600	1 Satuan Permukiman	11,608,000	0 Satuan Permukiman	22,067,000	0 Satuan Permukiman	176,752,000	0 Satuan Permukiman	197,762,700	1 Satuan Permukiman	197,762,700	100.00	98.81	2 Satuan Permukiman	421,474,100.00	200.00	24.06
59.	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	54 Kepala Keluarga	116,347,400	54 Kepala Keluarga	15,132,600	0 Kepala Keluarga	1,280,000	10 Kepala Keluarga	4,315,000	34 Kepala Keluarga	10,870,000	54 Kepala Keluarga	14,435,700	54 Kepala Keluarga	14,435,700	100.00	95.39	108 Kepala Keluarga	63,438,700.00	200.00	54.53
60.	3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan	1 Satuan Permukiman	1,635,334,000	1 Satuan Permukiman	185,010,000	1 Satuan Permukiman	10,328,000	0 Satuan Permukiman	17,752,000	0 Satuan Permukiman	165,882,000	0 Satuan Permukiman	183,327,000	1 Satuan Permukiman	183,327,000	100.00	99.09	2 Satuan Permukiman	358,035,400.00	200.00	21.89
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)															100.00	97.24			200.00	38.21
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)															100.00	98.81			200.00	24.06
			Predikat Kinerja (Kegiatan)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
			Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)															105.03	93.51			102.39	127.72
			Predikat Kinerja (Program)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)															94.45	96.47			133.56	103.66
			Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			Jumlah Anggaran dari seluruh Program																				
						38,424,373,279			1,412,606,794			7,369,851,831			12,524,084,886			37,020,523,107			37,068,905,907		
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Dukungan Pemerintah Kabupaten terhadap program Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan cukup tinggi; 2. Masih terbukanya kesempatan kerja, baik di dalam daerah maupun di luar daerah dan juga di Luar Negeri; 3. Masih terbukanya peluang kesempatan berwirausaha; 4. Masih tersedianya lahan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal; 5. Keinginan masyarakat ingin maju semakin meningkat."																				
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Belum adanya Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. 2. Belum tersedianya tata ruang yang selaras dengan kebutuhan berusaha. 3. Belum adanya peta potensi investasi. 4. Kurangnya kesadaran dan ketidakpahaman pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usahanya 5. Angkatan kerja yang selalu meningkat/ bertambah 6. Lowongan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyak nya minat/ jumlah pencari kerja 7. Kurang nya tenaga ahli/teknis yang memahami tentang billboard /videotron sehingga proses terlambat																				
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. mengawal dan berkoordinasi tentang proses Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 2. Mengadakan rapat koordinasi peningkatan iklim investasi di daerah dan evaluasi peningkatan realisasi investasi. 3. Penganggaran di Perubahan untuk penyusunan peta potensi 4. Pendampingan dan asistensi bagi pelaku usaha untuk melaporkan LKPM 5. Optimalisasi pelatihan kerja sesuai permintaan pasar kerja 6. Memberdayakan LPM Swasta supaya jangkauan pelatihan lebih luas 7. Kerjasama dengan perusahaan untuk pelatihan alat berat 8. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya percepatan realisasi Billboard/Videotron 3.																				

Disusun

Tanggal 30 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN

DR. AKHRIAN W. S. M. AP
NIP. 1971022819907021002

Tanggal 30 Januari 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. RAKHMADI YUSNI, S.SOS, M.AP
NIP. 197012071995031002